



**STATUS HUKUM TRANSEKSUAL PASCA PENETAPAN
PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN
DALAM KAJIAN TEORI EKSISTENSI**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara**

Oleh

**Agustini Andriani
NIM : 1701012002**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agustini Andriani

NIM : 1701012002

Tempat/TanggalLahir : Palembang, 1 September 1986

Pekerjaan : Advokat/Pengacara

Alamat : Jalan Brigjen H. Hasan Kasim Gang Taruno No.10,
RT.52, RW.10, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni,
Kota Palembang

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **“STATUS HUKUM TRANSEKSUAL PASCA PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DALAM KAJIAN TEORI EKSISTENSI”** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Palembang, 16 Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan,


Agustini Andriani
NIM: 1701012002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr.Rr. RinaAntasari, SH.,M.Hum
NIP : 19630712 198903 2 004
2. Nama : Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP : 19701126 199703 2 002

Dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“STATUS HUKUM TRANSEKSUAL PASCA PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DALAM KAJIAN TEORI EKSISTENSI”** yang ditulis oleh :

Nama : Agustini Andriani
NIM : 1701012002
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara

Untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Tesis (Hasil) pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Pembimbing I.

Dr.Rr. RinaAntasari, SH.,M.Hum
NIP.19630712 198903 2 004

Pembimbing II.

Dr. QodariahBarkah, M.H.I
NIP.19701126 199703 2 002



PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQOSYAH TERTUTUP

Tesis berjudul **“STATUS HUKUM TRANSEKSUAL PASCA PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DALAM KAJIAN TEORI EKSISTENSI”** yang ditulis oleh :

Nama : Agustini Andriani
NIM : 1701012002
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara

Telah dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tesis (Terbuka) pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI :


1. Prof. Dr.H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004

Tgl 17 - 7 - 2019

2. Dr. Zilal Binti Saari
Senior Lecturer Faculty Of Islamic Civilization
Universiti Teknologi Malaysia

Tgl 17 - 7 - 2019

Ketua


Dr. Ulya Kencana, MH
NIP. 19690923 199603 2 006

Palembang, 17 Juli 2019
Sekretaris


Dr. H. Sutrisno Hadi, MA
NIP.198004122014031001



PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Tesis berjudul "STATUS HUKUM TRANSEKSUAL PASCA PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DALAM KAJIAN TEORI EKSISTENSI" yang ditulis oleh :

Nama : Agustini Andriani
NIM : 1701012002
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara

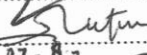
telah dimunaqasyahkan pada sidang Ujian Tesis (Terbuka) pada tanggal 2 Agustus 2019, dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Ulya Kencana, M.H.

Tgl  22 - 8 - 2019

Sekretaris : Dr. H. Sutrisno Hadi, M.A

Tgl  27 - 8 - 2019


Penguji I : Prof. Dr. H. Romli, S.A.M.Ag

Tgl  28 - 8 - 2019


Penguji II : Dr. Ulya Kencana, M.H.

Tgl  22 - 8 - 2019

Dekan


Prof. Dr. H. Romli, S.A.M.Ag
NIP. 195712191986031004

Palembang, 28 - 8 - 2019
Ketua Program Studi


Dr. Ulya Kencana, MH
NIP. 196909231996032005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT. Tuhan seluruh alam semestakarena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat merampungkan tesis yang berjudul ***“Status Hukum Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Jenis Kelamin dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan Dalam Kajian Teori Eksistensi”***. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang selalu istiqamah di jalan-Nya.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat pertolongan Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat merampungkan tesis ini. Untuk itu, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H Sirozi, MA,Ph.D selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus selaku Penguji I pada Ujian Seminar Hasil (Ujian Tertutup) dan Ujian Terbuka yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Ulya Kencana, S.Ag.,MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Tata Negara (HTN) sekaligus selaku Penguji II pada Ujian Terbuka yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini serta telah memberi arahan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang
4. Bapak Dr. H. Sutrisno Hadi, MA selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Tata Negara (HTN) dan yang telah banyak

memberikan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang

5. Ibu Dr.Rr. Rina Antasari, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah sabar mengajar dan memberikan ilmu selama penulis menempuh proses perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang.
7. Pimpinan Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
8. Orang Tua dan keluarga yang selalu mendo'akan serta memotivasi demi kelancaran pendidikan penulis.
9. Rekan-rekan sejawat Advokat di Perkantoran Advokat Palembang.
10. Rekan-rekan Program Studi Magister Hukum Tata Negara (HTN) angkatan 2017 yang telah bersama-sama selama proses perkuliahan dan banyak saling berbagi wawasan dan pengalaman.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Pihak yang telah banyak memberikan masukan dan saran selama penulisan tesis ini dan Penulis berharap tesis ini bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya dalam kajian Hukum Tata Negara.

Akhir kata penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kebaikan yang akan datang.

Palembang, 2 Agustus 2019
Penulis



Agustini Andriani
NIM: 1701012002

MOTTO

Dengan usaha, kesungguhan dan juga do'a, tak ada kata "mustahil" di dalam kehidupan ini.

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

"Barang siapa yang berjihad, sesungguhnya jihatnya itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri" (Qs. Al-Ankabut: 6)

PERSEMBAHAN

*Tesis ini kupersembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku nafas kehidupan serta kemudahan dalam menjalani hidup ini
Teruntuk kedua orang tuaku yang telah tenang berada di Syurga Allah SWT
Segenap keluargaku yang selalu memotivasiku
Almamater UIN Raden Fatah Palembang*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING I DAN II	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG	
SEMINAR HASIL	v
HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xviii
ABSTRAK BAHASA ARAB MELAYU.....	xxi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Kerangka Teori	21
F. Kerangka Konseptual.....	23
G. Penelitian Terdahulu.....	26
H. Metode Penelitian Hukum.....	31
I. Sistematika Pembahasan.....	35
BAB II KAJIAN TEORI EKSISTENSI DAN TEORI	
MAQASHID SYARIAH.....	37
A. Teori Eksistensi.....	37
1. Sejarah Munculnya Teori Eksistensi Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia	37
2. Tinjauan Umum Teori Eksistensi di Indonesia	41

B. Teori Maqashid Syariah	48
1. Tinjauan Umum dan Pengertian Maqashid Syariah	48
2. Pembagian Maqashid Al- Syariah	52
3. Sejarah Singkat Maqashid Al- Syariah	57
4. Kehujjahan Maqashid Al- Syariah	61
5. Konsep Maqashid Al- Syariah Perspektif Al-Syatibi	64
6. Maslahat dan Pengembangannya	68
7. Maqashid Al-Syariah dalam Penentuan Hukum	71
8. Prinsip dalam Maqashid Syariah.....	75
9. Kedudukan Maqashid Syariah dalam Hukum Islam	80

BAB III. TINJAUAN UMUM KETENTUAN HUKUM BAGI TRANSEKSUAL DI INDONESIA	81
A. Tinjauan Umum Transeksual di Indonesia	81
B. Pengaturan Tentang Perubahan Jenis Kelamin Bagi Transeksual di Indonesia	91
1. Operasi Kelamin Bagi Transeksual	91
2. Ketentuan Perubahan Jenis Kelamin Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	98
C. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	102
1. Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	102
2. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	126

BAB IV ANALISIS STATUS HUKUM TRANSEKSUAL PASCA PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN	137
A. Tinjauan Yuridis Status Hukum Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Jenis Kelamin.....	137

1. Status Hukum Transeksual yang melakukan Operasi Penyesuaian Jenis Kelamin	138
2. Status Hukum Transeksual yang melakukan Operasi Pergantian Jenis Kelamin	145
B. Implikasi dalam Hukum Perkawinan bagi Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Jenis Kelamin.....	154
C. Analisis Teori Eksistensi yang Berdasarkan Teori Maqashid Syariah dalam Rangka Mengisi Kekosongan Hukum (<i>Rechtvacuum</i>) Terhadap Permasalahan Status Hukum Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Jenis Kelamin	169
BAB V PENUTUP	181
A. Kesimpulan	181
B. Saran.....	183
C. Rekomendasi.....	183
DAFTAR PUSTAKA.....	184
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	197

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	<i>Alif</i>	‘
ب	<i>Ba</i>	b
ت	<i>Ta</i>	t
ث	<i>Tsa</i>	<u>S</u>
ج	<i>Jim</i>	j
ح	<i>Ha</i>	<u>H</u>
خ	<i>Kha</i>	kh
د	<i>Dal</i>	d
ذ	<i>Zal</i>	<u>Z</u>
ر	<i>Ra</i>	R
ز	<i>Zai</i>	Z
س	<i>Sin</i>	S
ش	<i>Syin</i>	Sy
ص	<i>Sad</i>	Sh
ض	<i>Dlod</i>	dl
ط	<i>Tho</i>	th
ظ	<i>Zho</i>	zh
ع	<i>‘Ain</i>	‘
غ	<i>Gain</i>	gh
ف	<i>Fa</i>	r
ق	<i>Qaf</i>	q
ك	<i>Kaf</i>	k
ل	<i>Lam</i>	l
م	<i>Mim</i>	m
ن	<i>Nun</i>	n
و	<i>Waw</i>	w

هـ	<i>Ha</i>	h
ء	<i>Hamzah</i>	‘
ي	<i>Ya</i>	y
ة	<i>Ta (marbutoh)</i>	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

-	
-----	Fatha
-----	Kasroh
-	
و	
-----	Dlommah

Contoh :

كتب : **Kataba**

ذكر : **Zukira (Pola I atau II) dan seterusnya**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	TandaHuruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathahdanya</i>	<i>ai</i>	<i>adani</i>
و	<i>Fathahdanwaw</i>	<i>au</i>	<i>adanu</i>

Contoh:

كيف : kaifa

على : ‘ala

حول : haula

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harkat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fatha dan alif</i> atau <i>ya</i>	<i>a</i>	a dan garis panjang diatas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	<i>i</i>	i dan garis diatas
او	<i>Dlommatain</i> dan <i>waw</i>	<i>u</i>	u dan garis diatas

قال سبحانك : *qala subhanaka*

صام رمضان : *shamaramadlana*

رمي : *rama*

فيها منافع : *fi manafi 'u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubuna ma yamkuruna*

اذ قال يوسف لا يبه : *izqala yusufu liabihi*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatulathfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madinah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkand engan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberitanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberitanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbana* نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	PolaPenulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	PolaPenulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberitanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تاخذون : *Ta'khuzuna*

الشهداء : *Asy-syuhada'u*

اومرت : *Umirtu*

فاتي بها : *Fa'tibiha*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازقين	<i>Wainnalalahalahuwakhair al-raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Faau fu al-kailawa al-mizani</i>

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul status hukum transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin dan implikasinya terhadap hukum perkawinan dalam kajian teori eksistensi. Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) terhadap ketentuan yang mengatur mengenai status hukum bagi kaum transeksual serta aturan khusus yang mengatur perubahan kelamin bagi transeksual. Namun di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan sebagai berikut: *“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”*.

Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahannya adalah mengenai transeksual dalam kaitannya dengan status hukumnya pasca dikeluarkannya penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin baik terhadap transeksual yang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin maupun terhadap transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin. Penelitian ini menganalisa secara yuridis terkait dengan keabsahan perubahan status hukum transeksual tersebut menurut hukum nasional dan hukum islam dan juga mengenai implikasinya terhadap hukum perkawinan, yang dikaitkan dengan keabsahan perkawinan tersebut menurut ketentuan perundang-undang yang berlaku serta dikaitkan pula dengan Teori Eksistensi dan Teori Maqashid Syariah.

Metode yang dipakai di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan mengenai suatu permasalahan, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu buku-

buku, jurnal, kertas kerja lokakarya/seminar dan lain-lain, laporan penelitian, majalah, desertasi/tesis dan sumber data sekunder antara lain mencakup: abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, penetapan pengadilan dan acuan lainnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Eksistensi dan Teori Maqashid Syariah. Dalam penelitian ini penulis akan mengaitkan pembahasan permasalahan dengan Teori Eksistensi pemberlakuan hukum islam di Indonesia berdasarkan Teori Maqashid Syariah dalam Rangka Mengisi Kekosongan Hukum (*Rechtvacuum*) Terhadap Permasalahan Status Hukum Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Jenis Kelamin. Hal ini sebagaimana bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia yaitu bahwa dalam hukum nasional dalam arti hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah Status hukum Transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin terdapat perbedaan. Bahwa terhadap transeksual jika melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin maka keabsahan perubahan identitasnya menurut hukum nasional maupun menurut hukum islam adalah sah. Namun berbeda dengan status hukum transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin jika menurut hukum nasional diakui keabsahannya ketika yang bersangkutan telah mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang pergantian jenis kelamin akan tetapi menurut hukum islam status hukumnya adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan. Kemudian, Implikasi hukum dalam hukum perkawinan bagi transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin juga terdapat perbedaan. Dikarenakan seorang Transeksual yang telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin oleh agama Islam tetap dianggap jenis kelamin sebelumnya. Maka apabila terjadi suatu perkawinan, perkawinan

tersebut dianggap sebagai perkawinan sejenis. Berbeda halnya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh transeksual yang melakukan penyesuaian jenis kelamin yaitu orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa*). Maka terhadap perkawinan orang yang berkelamin ganda yang telah melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin tersebut selanjutnya berlaku hukumnya adalah Perkawinan tersebut adalah sah, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas sebelumnya, Perkawinan tersebut dapat dibatalkan, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas lain dari sebelumnya

Kata kunci: transeksual, status hukum, penetapan pengadilan, perubahan jenis kelamin, perkawinan,

فئليتيان اين برجدول ستاتوس حكوم ترنسيك ساوال فسچ فنتفن فغادلن تنتغ فروبهن جنيس كلامين دان ايمقليكسيث ترهادف حكوم فركاوينن دالم كاجين تيوري ايكسيستنسي. فئليتيان اين دلاتر بلاكغا كوندسي ككوسوغن حكوم (ريجهتوچواوم) ترهادف ككنتوان يغ مغاتور مغنايي ستاتوس حكوم باكي قوم ترنسيك ساوال سرتا اتورن خصوص يغ مغاتور فروبهن كلامين باكي ترنسيك ساوال. نامون د دالم فاسل 56 ايات (1) اوندغ-اوندغ نومور 23 تاهون 2006 تنتغ ادمينيستراسي كئندودوكن مغاتور بهوا فنجنتن فريستيو فنتبغ لاينث دلاكوكن اوليه فجابت فنجنتن سيفيل اتس فرمينتآن فندودوق يغ برسغوتن ستله اداث فنتفن فريستيو "فغادلن نكري يغ تله مفروليه كقواتن حكوم تتف. سداغكن يغ دمقصود دغن دجلسكن دالم فنجلسن فاسل 56 ايات (1) او او ادمينيستراسي كئندودوكن "فنتبغ لاينث يغ دمقصود دغن "فريستيو فنتبغ لاينث" اداله فريستيو يغ دنتفن اوليه "سباكاي برايوت: "فغادلن نكري اونوق دچانتكن فئ ايسستنسي فلقسان، انتارا لاين فروبهن جنيس كلامين .

دالم فئليتيان اين، يغ منجادي فرمسئلنه اداله مغنايي ترنسيك ساوال دالم كايينث دغن ستاتوس حكوم فسچ دكلواركن فنتفن فغادلن تنتغ فروبهن جنيس كلامين بايق ترهادف ترنسيك ساوال يغ ملاكوكن او فراسي فسواين جنيس كلامين ماوقون ترهادف ترنسيك ساوال يغ ملاكوكن او فراسي فركننين جنيس كلامين. فئليتيان اين مغاناليسا سچارا يوريديث ترايت دغن كابسهن فروبهن ستاتوس حكوم ترنسيك ساوال ترسبوت منوروت حكوم ناسيونل دان حكوم اسلام دان جوگ مغنايي ايمقليكسيث ترهادف حكوم فركاوينن، يغ دكايتكن دغن كابسهن فركاوينن ترسبوت منوروت ككنتوان فرونداغ-اوندغ يغ بلاكو سرتا دكايتكن فولا دغن تيوري ايكسيستنسي دان تيوري مقشاد شرعية

ميتودي يغ دفاكاي د دالم فئليتيان اين برصفا ديسكريفتيف اناليتيس دغن مفاقركن مغنايي سواتو فرمسئلن، دان اناليس كواليتايف دغن اچوان ليتيراتور دان ككنتوان حكوم يغ برلاكو. سومبر داتا يغ دكوناكن اداله سومبر داتا فريمر يالايت بوكو-بوكو، جورنل، كرتس كرجا لوككاريا/سمينر دان لاين-لاين، لافورن فئليتيان، مجله، ديسيرتاسي/تيسيس دان سومبر داتا سكوندر انتارا لاين منچاكوث: ابسترك، ايندك س، بيبليوگرافي، فئربيتن. فمرينته، فنتفن فغادلن دان اچوان لاينث

تيوري يغ دكوناكن دالم فئليتيان اين اداله تيوري ايكسيستنسي دان تيوري مقشاد شرعية. دالم فئليتيان اين فنوليس اكن مغايتكن فمبهاسن فرمسئلن دغن تيوري ايكسيستنسي فمبرلاكوان حكوم اسلام د ايندونيسيا برداسركن تيوري مقشاد شرعية دالم راغك مغيسي ككوسوغن حكوم (ريجهتوچواوم) ترهادف فرمسئلن ستاتوس حكوم ترنسيك ساوال فسچ فنتفن فغادلن تنتغ فروبهن جنيس كلامين. حال اين سباكايان بنتوق ايكسيستنسي حكوم

اسلام دالم حكوم ناسيونل ښونځي يا ايت بهوا دالم حكوم ناسيونل دالم ارتي حكوم اسلام
(اگام) برفو غسي سباگاي څار يغ باهن-باهن حكوم ناسيونل ښونځي

حاصل دري څار يتيان اين اداله ستاتوس حكوم ترنسيك ساوال څسچ څنځن څغادلن تنځ
څرو بهن جنيس كلامين تر هادف ترنسيك ساوال يغ ملاكوكن او څراسي څر كځنن جنيس
كلامين دان ترنسيك ساوال يغ ملاكوكن او څراسي څيمڅور نان جنيس كلامين تر داقت
څر بيداان. بهوا تر هادف ترنسيك ساوال جك ملاكوكن او څراسي څيسواين جنيس كلامين مك
كابسهن څرو بهن ايدينتيتس منوروت حكوم ناسيونل ماوڅون منوروت حكوم اسلام اداله سه.
نامون بر بيدا دغن ستاتوس حكوم ترنسيك ساوال يغ ملاكوكن او څراسي څر كځنن جنيس
كلامين جك منوروت حكوم ناسيونل داكو ي كابسهن كځنن يغ برسغوكنن تله منداقتن څنځن
دري څغادلن تنځ څر كځنن جنيس كلامين اكن تنافي منوروت حكوم اسلام ستاتوس حكوم
اداله سام دغن جنيس كلامين سمولا سڅرتي سلوم دلاكوكن او څراسي كځنن كلامين، مسكي
تله مڅور ليه څنځن څغادلن. كمودين، ايمڅليكي سي حكوم دالم حكوم څر كاوينن باكي ترنسيك
ساوال څسچ څنځن څغادلن تنځ څرو بهن جنيس كلامين تر هادف ترنسيك ساوال يغ ملاكوكن
او څراسي څر كځنن جنيس كلامين دان ترنسيك ساوال يغ ملاكوكن او څراسي څيمڅور نان
جنيس كلامين جو ك تر داقت څر بيداان. دكارينكن ساورغ ترنسيك ساوال يغ تله ملاكوكن
او څراسي څر كځنن جنيس كلامين اوليه اگام اسلام تنځ داغځف جنيس كلامين سلومځ. مك
اڅاببلا تر جادي سواتو څر كاوينن، څر كاوينن تر سبوت داغځف سباگاي څر كاوينن سجنيس.
بر بيدا حالځ تر هادف څر كاوينن يغ دلاكوكن اوليه ترنسيك ساوال يغ ملاكوكن څيسواين
جنيس كلامين يا ايت اورغ يغ بر كلامين كندا (څنځن). مك تر هادف څر كاوينن اورغ يغ
بر كلامين كندا يغ تله ملاكوكن او څراسي څيسواين جنيس كلامين تر سبوت سلانجوځن بر لاکو
حكومځ اداله څر كاوينن تر سبوت اداله سه، جك او څراسي كلامين يغ دلاكوكن بر توجوان
اونتوق مڅر تځس ايدينتيتس سلومځ، څر كاوينن تر سبوت داقت دبطلكن، جك او څراسي
كلامين يغ دلاكوكن بر توجوان اونتوق مڅر تځس ايدينتيتس لاین دري سلومځ

كات كوڅي: ترنسيك ساوال، ستاتوس حكوم، څنځن څغادلن، څرو بهن جنيس كلامين،
څر كاوينن،

ABSTRACT

This study entitled the status of transsexual law after the court's determination of changes in sex and its implications for marriage law in the study of the theory of existence. This research is motivated by the condition of legal vacuum (*rechtvacuum*) of the provisions governing the legal status of transsexuals as well as special rules governing sex change for transsexuals. However, in Article 56 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration regulates that the recording of other important events is carried out by the Civil Registration Officer at the request of the concerned resident after the stipulation of a district court that has obtained permanent legal force. Whereas what is meant by "other important events" are explained in the Elucidation of Article 56 paragraph (1) of the Population Administration Act as follows: "What is meant by" other important events "are events determined by the district court to be recorded at the Implementing Agency, including changes in types genitalia ".

In this study, the problem is with regard to transsexuals in relation to their legal status after the issuance of a court ruling on sex change both for transsexuals who perform sex adjustment operations or for transsexuals who perform sex change operations. This research analyzes juridically related to the validity of the change in the status of the transsexual law according to national law and Islamic law and also regarding its implications for marriage law, which is associated with the legality of the marriage according to the provisions of the applicable laws and is also related to the Existence Theory and Maqashid Sharia Theory.

The method used in this study is analytical descriptive by describing an issue, and qualitative analysis with reference to the literature and applicable legal provisions. Data sources used are primary data sources, namely books, journals, workshop papers / seminars, etc., research reports, magazines, dissertations / theses and secondary data sources, including among others: abstracts, indexes, bibliographies, government publishing, court rulings and other references.

The theory used in this research is the Theory of Existence and Theory of Maqashid Syariah. In this study, the author will link the discussion of the problem with the Theory of Existence of the enactment of Islamic law in Indonesia based on the Maqashid Sharia Theory in the Framework of Filling Legal Void (Rechtvacuum) Against the Problems of Transsexual Legal Status Post-Court Judgment About Gender Change. This is as a form of the existence of Islamic law in Indonesian national law which is that in national law in the sense of Islamic law (religion) functions as a filter for Indonesian national legal materials.

The results of this study are the legal status of transsexuals after the court's determination regarding sex changes to transsexuals who perform sex change operations and transsexuals who carry out sex enhancement operations, there are differences. Whereas if transsexuals are carrying out sex adjustment operations, the validity of their identity changes according to national and Islamic law is legal. However, it is different from the status of transsexual law which conducts sex change operation if according to national law, its validity is recognized when the person concerned has received a court decision regarding sex change, but according to Islamic law the legal status is the same as the original sex as before the sex change operation, despite having received a court decision. Then, the legal implications in marital law for transsexuals after the court's decision on sex change for transsexuals who perform sex change operations and transsexuals who perform gender enhancement operations also have differences. Because a transsexual who has carried out sex change operations by the Islamic religion is still considered a previous sex. So if there is a marriage, the marriage is considered as a kind of marriage. Unlike the case of marriages carried out by transsexuals who make gender adjustments, namely people who have a double gender (Khuntsa). Then the marriage of a double-sex person who has performed the sex adjustment operation hereinafter applies the law is the marriage is legal, if the sex operation carried out aims to reinforce the previous identity, the marriage can be canceled, if the sex operation carried out aims to reinforce other identities from the previous

Keywords: transsexual, legal status, court order, sex change, marriage,

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Tema Penelitian.	29
Tabel 2.1 Legislasi Hukum Islam di Indonesia.....	46
Tabel 3.1 Perbedaan Operasi Kelamin.	95

